

Demam Seks di Indonesia

Ariel Heryanto

SEKS, seperti halnya seksualitas dan gender, tidak pernah bersifat alamiah. Dalam seluruh sejarahnya, seks merupakan hasil bentukan masyarakatnya. Ia terbentuk lewat berbagai proses pembinaan dan penindasan yang berbeda-beda, dari satu zaman ke zaman berikutnya.

Karena itu, seks tak bisa dibicarakan secara umum dan sebagai suatu generalisasi. Pembicaraan itu senantiasa menuntut keterangan batas-batas konteks sosial dan kesejarahannya.

Indonesia pasca 1980-an

Sesudah tahun 1980-an, terjadi suatu perubahan yang cukup mencolok pada sosok masyarakat Indonesia. Di sini hanya perlu disebutkan beberapa saja di antara perubahan itu yang sangat penting.

Sesudah tahun 1980, perekonomian Orde Baru merupakan masa pembangunan tanpa banjir sumber dana dari ekspor minyak. Peristiwa ini sendiri diikuti oleh sejumlah peristiwa lain yang tak kalah penting: serangkaian deregulasi, debirokratisasi, dan paket-paket kebijakan baru lainnya.

Perubahan ekonomi itu mendorong perubahan perhatian masyarakat dalam bidang politik dan ideologi: swastanisasi, keterbukaan dan demokratisasi. Jelas ini menandai, jika bukan menggantikan, "stabilitas dan keamanan" sebagai tema sentral perbincangan politik dan ideologi dari dekade sebelumnya.

Mungkin ada yang berpendapat, "swastanisasi, keterbukaan dan demokratisasi" merupakan suara meriah dan bising yang tak sesuai dengan kenyataan konkretnya. Boleh jadi pengamat itu benar. Tapi perubahan "kebisihan" itu sendiri bukan tanpa makna sosial.

Satu contoh kebisingan lain yang penting sejak dekade 1980-

an adalah perbincangan tentang ada-tidaknya "kelas menengah Indonesia". Ini tidak aneh. Kisah kelas menengah merupakan kisah penokohan bagi hikayat besar tentang swastanisasi, keterbukaan dan demokratisasi. Peristiwa dramatik membutuhkan tokoh-tokoh.

Masih dalam rangkaian dinamika sosial yang sama, masa sesudah tahun 1980-an ditandai oleh dua hal yang seakan-akan bertolak belakang. Di satu pihak muncul kebangkitan semangat dan solidaritas keagamaan yang meluap. Di pihak lain, gelombang keasyikan berbincang tentang seks. Keduanya menjadi simbol serta topik-topik diskusi, wawancara atau studi ilmiah bagi berbagai kalangan, dengan minat dan kepentingan yang beraneka ragam.

Ada kelompok yang mendalam penghayatan keagamaan sebagai bagian dari pilihan ibadah dan keimanan. Ada yang mendalam aspek sosial dari kebangkitan religius ini bagi upaya-upaya kemanusiaan dan persatuan bangsa. Ada kelompok moralis yang memprioritaskan merosotnya moralitas seksual di kalangan remaja. Ada banyak pedagang media massa yang menambah laba dari bursa perbincangan tentang seksualitas, dengan sedikit berlagak ikut berprihatin atas permisivitas seks.

Mungkin munculnya tema "kerukunan antaragama" yang menonjol belakangan ini berkaitan dengan potensi ketegangan antaragama yang dikhawatirkan bisa meletup. Ini merupakan gejala sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Tidak juga dikenal di masa Orde Lama. Pertikaian antaraliran, antarpatriai atau antarsuku sudah

menjadi lagu lama di sepanjang sejarah kita. Tapi bukan ketegangan antaragama seperti belakangan ini.

Hal yang sama dapat dikatakan untuk gelombang minat pada seks. Sebagai bangsa Timur, jelas masyarakat kita lebih dahulu punya sejarah keterbukaan dan permissivitas ketimbang masyarakat Barat dalam hal seks. Sampai-sampai pemerintah kolonial harus menjinakkan keterbu-

tan antara mereka. Apalagi jika hendak dijelaskan dalam satu kerangka-dasar pengkisan, atau ditata dalam satu bagan atau peta persoalan yang rapi.

Kita tak bisa sembarangan menyimpulkan bahwa semua peristiwa itu disebabkan dan dibentuk oleh merosotnya harga minyak di pasaran dunia sesudah tahun 1980-an. Faktor ekonomi ini hanyalah sebagian dari faktor yang bermacam-macam. Bukan satu-satunya, dan mungkin juga yang terpenting bagi semua peristiwa di atas.

Kontroversi RUU perzinaan menunjukkan hal lain yang belum banyak diperhitungkan, yakni proses "seksualisasi". Yang pro dan kontra pada liberalisasi seksual, sama-sama menganggap seks sebagai hal yang penting.

Kontroversi ini memberikan efek yang tak jauh berbeda dari iklan-iklan yang erotik dan berbagai diskusi terbuka tentang seks.
Semuanya menggiring "seks" ke pusat perhatian masyarakat.

kaan seks bangsa pribumi ini.

Tapi baru sejak 1980-an, bangsa kita beramai-ramai menikmati perbincangan serius dan "ilmiah" tentang seks. Ironisnya, perbincangan ini didorong dari budaya kapitalisme akhir Barat, yang sebenarnya lebih terbelakang dalam soal erotika ketimbang Timur.

Kaitan-kaitan yang tidak total

Berbagai gejala yang disebutkan di atas jelas punya kaitan satu dengan yang lain. Tapi sulit sekali menjelaskan kaitan-kaitan

ada pengamat yang menduga bangkitnya semangat keagamaan di Indonesia merupakan ungkapannya protes terhadap dekadensi moral dan materialisme yang menjadi bagian dari proses industri kapitalisme (yang kini diberi julukan "pembangunan").

Kebangkitan gairah seks mungkin juga bisa dikaitkan dengan proses yang sama, walau dengan arah yang lain. Letupan gairah seksual masyarakat kita ini berkembang sebagai kompensasi, atau serangan balik, terhadap proses industri kapitalisme yang menekankan etos kerja keras,

melebihi negara-negara lain? Sehingga hal itu menjadi sebuah bencana nasional, apabila tidak segera ditindas dengan hukum represi? Sehingga, kita membutuhkan represi seksual yang lebih hebat dari yang dikenal di negara-negara lain?

Dengan kata lain, boleh jadi perluasan dan pendalamannya religius masih saudara-sekandung dengan kemerdekaan seksual masyarakat Indonesia. Kedua-duanya adalah anak zaman pembangunan industri kapitalisme Indonesia.

Ada lagi pengamat yang menghubungkan kebangkitan keagamaan dan gairah seks mutakhir ini dengan bangkitnya sosok kelas menengah. Yang terjadi bukan sekadar semaraknya perbincangan tentang agama atau seks, sebagai akibat dari semakin mencoloknya sosok aspirasi kelas menengah ini. Namun sebaliknya: dapat diamati semakin kuatnya aspirasi kelas menengah dalam mewarnai citra dominan keagamaan dan seksualitas kita. Kehidupan agama dan seks kita semakin lama dibuat semakin "tidak kampungan" — semakin "bersih" dan "bergaya".

Dalam konteks kesejarahan seperti ini, kita dapat memahami munculnya Rancangan Undang-undang (RUU) tentang perzinaan yang baru. Dalam konteks yang sama itu juga, kita dapat memahami reaksi dan kontroversi dalam masyarakat terhadap RUU tersebut.

Represi dan promosi seksual

Represi seksual merupakan bagian dari sejarah panjang umat manusia. Apalagi sejak zaman kolonial Eropa yang berlanjut hingga kini di banyak negara bekas terajah, termasuk Indonesia.

Tetapi tampaknya, masyarakat kita belum pernah kenal UU se-represif yang diusulkan dalam RUU perzinaan itu.

Jadi, mengapa baru sekarang munculnya? Peminat ilmu sosial tidak usah terburu-buru mendukung atau mengecam isi RUU itu, tapi memahami terlebih dahulu, gejala apakah ini?

Apakah perzinaan di Indonesia sudah luar biasa hebatnya

yang erotik dan berbagai diskusi terbuka tentang seks. Semuanya menggiring "seks" ke pusat perhatian masyarakat.

Seks menjadi wilayah yang penting bagi pendefinisian identitas pribadi maupun sosial. Seks menjadi lahan sentral dalam kegiatan ilmu, teknologi dan usaha-dagang. Inilah yang disebut "seksualisasi". Dalam bahasa slogan yang populer di Indonesia: "meng-seks-kan masyarakat dan me-masyarakat-kan seks".

Filosof Perancis bernama Michel Foucault memberikan peringatan tentang hal ini. Jangan diikira keterbukaan untuk mengumbang nafsu dan perbincangan tentang seks akan memberikan kemerdekaan bagi kita. Mungkin justru sebaliknya. Sebab, menurut Foucault, kekuasaan yang menindas kemerdekaan kita tidak bekerja hanya dengan sepele-rangka larangan-larangan, sensor atau tabu terhadap pengetahuan dan perilaku. Kekuasaan juga meraja-lela lewat produksi, promosi, pendidikan atau dukungan terhadap perilaku dan pengetahuan dan perilaku seksual.

Karena itu, Foucault membacarkan perlunya "de-seksualisasi", yakni pengurangan keasyikan memperhatikan soal-soal yang berpusat pada soal seks. Pesan Foucault tampaknya penting untuk masyarakat Indonesia mutakhir yang baru kena demam-seks.

Foucault tidak menganjurkan penindasan gairah seksual, karena hal itu hanya akan memproduksikan seksualisasi lebih seru. Ia hanya mengingatkan hidup ini tidak sesempit "daun" seks. Yang diinginkan Foucault agaknya tak jauh berbeda dari kehidupan masyarakat kita sebelum masa kolonial: gairah seks tidak ditindas, tapi juga tidak diiluminahkan, diseminarkan, dikomersialkan, sehingga menjadi pusat kesibukan dan identitas sosial seperti sekarang***.

* Ariel Heryanto, dosen Program Pascasarjana UK Satya Wacana, Salatiga.